

PERANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LINGGA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA

Nurbaiti Usman Siam
STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Email. nurbaiti@gmail.com

Submitted : 23-07-2015, Reviewed: 23-07-2015, Accepted: 23-07-2015

<http://dx.doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.17>

Abstract

In developing the tourism potential in the area of coastal tourism, Culture and Tourism Department launched Lingga regency coastal resorts as tourist areas open to the medium, the potential developed is the beach and the sea through the attraction beach maintenance activities, and to carry out a program of cultural potential of the Tourism Village that will be working on the Daik Village, the Village and Village Mepar Resun, while the infrastructure facilities in collaboration with the private sector and other areas such devices and Sanitation Department and the Department of Public Works. Kegiatan promotion done Dinas Kebudayaan and Tourism Lingga Regency done in two ways: through events and through the mass media and supported by the provincial government and the private sector which is also a hotel and culinary tourism players.

Keywords: *Development, Tourism, Culture*

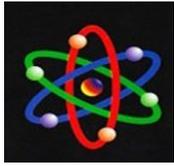
PENDAHULUAN

Kabupaten Lingga merupakan daerah yang memiliki banyak potensi kepariwisataan dari Sumber Daya Alam (SDA), hingga seni dan budaya. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha (UU No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Lingga tersebar di beberapa wilayah barat dan timur pulau Lingga. Dari beberapa potensi yang kaya akan sumber daya alam tersebut terdapat potensi yang sangat di Ungulkan di Kabupaten Lingga yaitu potensi objek wisata pantai dan bahari (laut) yang terletak di bagian barat Kabupaten Lingga. Sumber daya alam itulah yang menjadi salah satu misi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lingga yaitu mengembangkan daya tarik objek wisata Pantai yang ada di Kabupaten Lingga dan mempromosikannya ke seluruh penjuru dunia. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai fungsi untuk mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang ada di daerah tersebut seperti potensi pertambangan, perikanan, pertanian serta potensi kepariwisataan. Demikian pula halnya Pemerintah Kabupaten Lingga memiliki potensi dalam bidang pariwisatanya. Untuk itulah Pemerintah beserta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dapat mengembangkan potensi pariwisata tersebut sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Lingga.

Wisata pantai dan bahari merupakan salah satu potensi yang sangat menonjol di Kabupaten Lingga sebagai ciri khas daerah yang dikelilingi oleh Pulau dan laut pastinya. Untuk itulah perlu adanya



pemeliharaan cagar budaya dan laut agar kawasan wisata dapat dikembangkan dan berdampak positif. Sebagai mana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 2011(Pasal 14) bahwa seluruh penyelenggara kegiatan usaha daya tarik wisata alam wajib memperhatikan menjaga pelestarian lingkungan alam dan budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas wilayah kawasan wisata yang kaya akan cagar budaya alam, laut, serta terumbu karang harus dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan agar terciptanya tujuan pariwisata untuk pembangunan daerah.

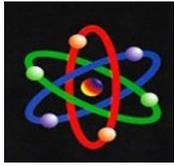
Wilayah kawasan wisatayang kaya akan ekosistem lautnya tersebut terdiri dari empat Bagian yang membentang sepanjang 1 Kilometer di bagian barat Kabupaten Lingga, masyarakat sekitar mengenalnya dengan pantai Pasir Panjang, Pantai Mempanak, dan Pantai Dungun. Potensi-potensi inilah yang harus secara terus menerus ditingkatkan melalui peran khusus dari Pemerintah yang diemban oleh Dinas Pariwisata.Oleh karena itu perlu adanya upaya nyata Pemerintah dalam meningkatkan daya tarik objek wisata bahari secara optimal yaitu melalui penyelenggaraan Kegiatan kepariwisataan.

Tanggung jawab pemerintah dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) dikawasan objek wisata tertuang dalam peraturan Bupati Lingga Nomor 13 Tahun 2011 pasal 5 diuraikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap : Pembangunan daya tarik wisata, pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pembangunan aksesibilitas dan atau transportasi dan pemberdayaan masyarakat.

Program yang dilaksanakan di kawasan wisata diatas bertujuan untuk

memperkenalkan Kabupaten Lingga dan potensi wisatanya kepada wisatawan yang berkunjung melalui media masyarakat sebagai pelakunya. Posisi masyarakat sangatlah penting karena pariwisata dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk berkembang melalui kegiatan ekowisata, sehingga potensi manusia dapat diberdayakan dengan baik dan tidak lagi menjadi penonton melainkan dapat berinteraksi secara langsung dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung. Program itulah yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sebagai implementasi tujuan awal pemerintahan yaitu sebagai wujud hubungan antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat.

Dampak positif pengembangan kepariwisataan salah satunya yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dapat berasal dari banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung maupun menginap di lokasi wisata. Wisatawan merupakan unsur terpenting untuk berkembangnya suatu objek dan daya tarik kepariwisataan. Dengan tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di Kabupaten Lingga secara otomatis mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat dan usaha-usaha pariwisata. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa Kabupaten Lingga adalah kawasan wisata yang cukup dilirik oleh para wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata. Kondisi yang tidak sebanding dengan antusias wisatawan lokal yang terus mengalami penurunan, oleh karena itu peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga juga dititik beratkan kepada kegiatan wisata untuk masyarakat lokal melalui program sadar wisata dan pengembangan desa wisata



agar minat dan antusias wisatawan lokal akan tumbuh menjadi salah satu daya tarik destinasi wisata. Pengembangan suatu destinasi wisata harus melalui perencanaan yang tepat melalui *aksesbility*, kondisi infrastruktur pariwisata, dan interaksi sosial masyarakat dengan wisatawan.

Sebagai kawasan objek wisata yang cukup produktif dan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat, Peran pemerintah juga diperlukan dalam memberikan klasifikasi, pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam kegiatan ekowisata masyarakat, diharapkan dengan adanya kegiatan ekowisata dapat menunjang meningkatkan ekonomi masyarakat, dan keterampilan masyarakat dan usaha pariwisata yang berdiri di kawasan objek wisata pantai, usaha pariwisata merupakan komponen yang sangat penting selain sebagai penunjang dan promosi produk wisata, usaha pariwisata juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Usaha kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang secara terus menerus diupayakan pengembangannya agar dapat didayagunakan sebagai salah satu sektor andalan dalam kegiatan perekonomian daerah. Berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu daerah akan memberikan pengaruh dan dorongan pembangunan sektor-sektor lainnya, khususnya dalam memperluas lapangan kerja dan peluang usaha. Melihat bahwa Kabupaten Lingga memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang masih asli dengan keadaan alam dan budayanya, perkembangan ekowisata akan terus meningkat seiring terus berkembang dan meningkatnya usaha pariwisata. Potensi tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian, memajukan kebudayaan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Terutama dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah menjadi

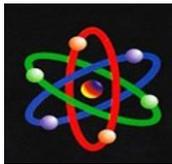
memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola daerahnya tanpa proses birokrasi yang cukup lama ke pemerintah pusat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga tentunya telah mempunyai tugas dan fungsinya yang harus dilaksanakan untuk pengembangan lokasi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Lingga. Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimana peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Lingga, hal tersebut dapat dilihat dari gejala-gejala masalah sebagai berikut :

- Masih minimnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepariwisataan dilokasi wisata, seperti kebersihan, kenyamanan, pelayanan, pada fasilitas pariwisata.
- Belum begitu mampu berperan dalam peningkatan seni dan budaya dengan mempertahankan kondisi keanekaragaman pariwisata seperti atraksi budaya yang berwawasan alam, kerajinan, serta adat istiadat, guna meningkatkan jumlah wisatawan.
- Masyarakat belum sepenuhnya diberdayakan sebagai salah satu pendukung kepariwisataan.
- Kelestarian alam yang perlu dipertahankan menampilkan atraksi wisata baru baik potensi yang sudah ada maupun hasil ciptaan manusia.

KERANGKA TEORITIS DAN METEDOLOGI

Hubungan antara Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dengan kajian Ilmu Pemerintahan ialah salah satu upaya yang dilakukan oleh



perangkat daerah Kabupaten Lingga dalam menjalankan Otonomi Daerah dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan, demi terselenggaranya Pemerintahan yang baik.

1. Pengertian Pemerintahan

Pada dasarnya yang berperan dalam memberikan peraturan bagi kepentingan masyarakat adalah pemerintah, sesuai dengan pendapat Djopari dan Ratnia (2008:01) mengemukakan bahwa pemerintah merupakan gejala yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat yaitu hubungan antar manusia dalam setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Ilmu yang sarannya mempelajari gejala-gejala Pemerintahan dalam arti bagaimana proses penyelenggara kekuasaan di dalam Negara itu dilaksanakan adalah ilmu pemerintahan pada umumnya.

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang berwenang untuk memproses pelayanan publik dan juga berkewajiban untuk memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Makna pemerintah juga dikemukakan oleh Syafeii (2004:47) bahwa "Pemerintah adalah badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara". Dari pengertian diatas dapat penulis jelaskan bahwa pemerintah merupakan satu-satunya badan untuk mengurus serta mengatur sebuah negaraserta badan yang bertanggung jawab atas segala yang terjadi dalam suatu negara, dimana pemerintah sangat berperan dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan pelayanan dalam segala bidang demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Soewargono dan Djohan yang dikutip oleh Labolo (2005:27) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi

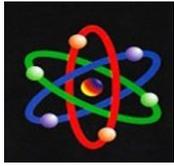
terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Pemerintah menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Sedangkan dalam bidang kepariwisataan pemerintah bertugas Mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di berbagai daerah menetapkan daya tarik objek wisata di suatu Negara. Menurut Ndraha dalam Kybernology 1 (2003:74) menjelaskan pengertian pemerintah, yaitu :

- a. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja
- b. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintah. Hal ini terdapat misalnya di indonesia dibawah UUD 1945 : kekuasaan pemerintah meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan "*concentration and responsibility*".

Berdasarkan pengertian diatas makna dari pemerintahan yaitu dimana adanya kekuasaan, adanya kebijakan, adanya implementasi serta adanya sanksi yang akan dijatuhkan. Untuk itulah pemerintahan menjadi suatu ilmu yang dapat dipelajari untuk mengetahui kegiatan-kegiatan kenegaraan dalam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat secara menyeluruh agar terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Peranan

Peranan pada dasarnya merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan (*position*)



tertentu. Menurut Kast dan Rosenweig yang diterjemahkan oleh Ali (2002:447) “peranan adalah aspek dinamis dari status, yaitu apa yang harus dilakukan seseorang untuk memisahkan jabatan dari statusnya”, masih menurut Kast dan Rosenweig yang diterjemahkan oleh Ali (2002:464) “peranan ialah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi”.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atas status karena peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut sebagai status subjektif untuk melakukan suatu fungsi.”

Berdasarkan pendapat diatas peneliti analisa bahwa peranan merupakan bentuk kegiatan maupun perilaku yang dilakukan seseorang dalam sebuah organisasi dalam rangka mengemban suatu jabatan. Hal ini berarti apabila Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsi masing-masing bidang yang ada maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang kebudayaan dan pariwisata.

3. Pengembangan Pariwisata

Destinasi atau tujuan pariwisata merupakan area atau kawasan geografis yang berbeda dalam suatu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdiri dari unsur daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat dan wisatawan yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan. Selain memberdayakan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memiliki peran dalam pengembangan kepariwisataan. Menurut Mill (2000:168) tujuan Pengembangan Pariwisata adalah :

“Dikembangkan secara cepat, tepat, pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan pengembangan infrastruktur dan penyediaan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling menguntungkan, pengembangan wisata hendaknya disesuaikan dengan daerah tujuan wisata”

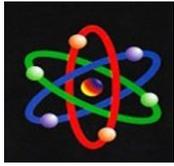
Dari pendapat diatas dikemukakan bahwa tersedianya fasilitas dan infrastruktur merupakan unsur yang paling penting yang dapat dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Serta dapat memberikan kepuasan bagi wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata. Yang mana seperti diketahui keberhasilan pemerintah dalam pengembangan suatu objek wisata hingga tercapainya kawasan wisata tergantung pada tiga hal yaitu :

a. Atraksi (*attraction*)

Yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata tersebut yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata diantaranya ialah benda- benda yang terdapat dialam yang dapat dilihat pada destinasi wisata seperti Keadaan alam, Bentuk tanah dan pemandangan, Hutan, Flora dan Fauna, Hasil ciptaan manusia (*man made supply*) yaitu *historical* (sejarah), *cultural* (budaya) dan *religious* (agama).

b. Aksesibilitas (*accebility*)

yaitu akses menuju destinasi pariwisata. Aktifitas banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi Karena faktor jarak dan waktu sangat mempengaruhi keinginan seseorang dalam melakukan perjalanan



kepariwisataan. Unsur terpenting dari aksesibilitas adalah transportasi yang meliputi : jalan; jembatan; terminal; Stasiun dan bandara.

c. Fasilitas (*amenities*)

Yaitu kelengkapan kegiatan kepariwisataan dalam suatu kawasan wisata, fasilitas pariwisata tidak akan terpisah dengan akomodasi perhotelan, karena pariwisata tidak akan berkembang tanpa penginapan. Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya keamanan dan kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu destinasi wisata. Adapun sarana yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata adalah Akomodasi hotel; Restoran; Air bersih; Komunikasi; Hiburan dan Keamanan.

Berdasarkan pendapat diatas daya tarik wisata merupakan hal yang penting dalam perkembangan suatu objek wisata karena dengan berpariwisata merupakan salah satu cara seseorang, kelompok untuk menghabiskan waktu luangnya untuk berlibur atau berpergian ke tempat yang ia inginkan dengan maksud untuk melepas kepenatan pekerjaan atau sekedar berkunjung.

4. Peranan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lingga

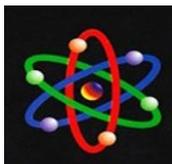
Dalam hal ini Pemerintah beserta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam bidang pariwisata memiliki peranan dalam perencanaan program, pengelolaan objek wisata pengembangan pariwisata serta menetapkan destinasi wisata, Dalam mengelola dan mengembangkan suatu objek wisata pemerintah harus mempertahankan kondisi sosial budaya serta keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,

Pemerintah mempunyai wewenang dalam hal :

- a. Menyusun dan Menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di daerahnya;
- c. Melaksanakan Pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha industri pariwisata;
- d. Menetapkan destinasi pariwisata;
- e. Menetapkan daya tarik objek wisata;
- f. Memfasilitasi promosi pariwisata dan produk pariwisata.

Dalam Pengelolaan pariwisata, pemerintah haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas sosial. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Cox yang dikutip I Gde Pitana (2009 :81) yaitu :“Pengembangan pariwisata harus memperhatikan kaunikan lokal yang melrefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan, peningkatan sumber daya yang menjadi basis pengembangan pariwisata, pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada kekhasan budaya lokal, pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya, serta serta memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berdampak positif”.

Berdasarkan pendapat Cox diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai peran dan bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan pariwisata, pariwisata tersebut haruslah berdampak kepada



kelestarian alam, keadaan sosial budaya, sumber daya manusia, dan pihak pengelola pariwisata. Pemerintah harus memastikan bahwa pariwisata berdampak pada pembangunan dan keuntungan lainnya, sekaligus berdampak pada keadaan sosial ekonomi. Pengelola usaha pariwisata juga harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah agar terciptanya suasana interaksi yang kondusif antara masyarakat dengan pengelola pariwisata dan Pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan ialah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penulis berupaya mencari fakta-fakta sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian, kemudian dipaparkan secara jelas guna memberikan gambaran tentang adanya suatu fenomena sosial. Pendapat mengenai metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:3) adalah Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengemukakan gambaran dan permasalahan dari Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Lingga. Dalam penelitian ini memiliki jumlah populasi 78 orang dan hanya memiliki jumlah sampel 16 orang.

Pembahasan

Pengembangan pariwisata di suatu wilayah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut. Peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam kebijakan pariwisata berpengaruh cukup besar terhadap majunya pariwisata menjadi salah satu industri penunjang perekonomian di suatu Negara.

Dalam bidang kepariwisataan pemerintah bertugas untuk mengembangkan wisata

dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat serta pembangunan nasional. Disisi lain pariwisata di sebagian besar Negara juga dapat dijadikan sebagai *icon* dan menjadi penerimaan terbesar untuk suatu Negara.

Dalam penelitian ini peneliti telah memberikan batasan-batasan yang digunakan untuk mengetahui bagaimanakah peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam mengembangkan kawasan objek wisata. Maka penulis menetapkan tahapan-tahapan beserta indikatornya sebagai berikut:

Pengembangan Potensi Wisata

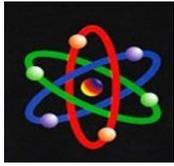
Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam mengembangkan potensi wisata adalah yang dapat dikembangkan sebagai suatu daya tarik wisata untuk dijadikan produk wisata unggulan yang di sesuaikan dengan kondisi alam.

Untuk melihat bagaimanakah Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata di kawasan Objek Wisata, dapat dilihat dari :

a. Atraksi wisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga berperan dalam mengembangkan segala sesuatu yang menjadi daya tarik dari suatu kawasan wisata dan terdapat di daerah tujuan wisata tersebut serta menjadi dasar wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* dan beberapa responden, dapat peneliti analisa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sudah berperan dalam mengembangkan kawasan Objek wisata Pantai yaitu dijadikan objek wisata terbuka, dalam hal ini memprioritaskan kawasan Pantai untuk kalangan menengah kebawah, bahkan semua lapisan masyarakat



dengan mengunggulkan potensi pantai dan wisata minat khusus, wisata minat khusus diantaranya yaitu, Perahu Layar sedangkan untuk mengembangkan potensi pantainya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga memprogramkan kegiatan *Fametri*, pengembangan kawasan pantai dan program desa wisata yang berada di Kelurahan Daik, Desa Mala. Desa Sungai Pinang dan Desa Teluk.

Menanggapi analisa dari hasil wawancara tersebut, dan hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya di kawasan objek wisata pantai. Dari hasil observasi yang dilakukan sebagai besar wisatawan dikawasan objek wisata pantai merupakan kalangan menengah kebawah. Sedangkan program desa wisata belum sepenuhnya dapat berjalan.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam mengembangkan atraksi wisata pantai mengedepankan pengembangan potensi alam, seni budaya, Perkampungan nelayan dan wisata terbuka umum.

b. Fasilitas Penunjang Atraksi Wisata (Sarana dan Prasarana)

Pemerintah atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyediakan atau melakukan pengawasan terhadap fasilitas kepariwisataan yang telah tersedia, Adapun fasilitas yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata adalah Akomodasi, hotel, Restoran, Air dan lain-lain.

Faktor Pengembangan Pariwisata

Pasar merupakan faktor pengembang yang merupakan suatu aspek yang mendukung kegiatan kepariwisataan yang telah ada maupun hasil dari suatu kegiatan. Untuk lebih mempertajam analisa dan untuk memberikan batasan-batasan yang

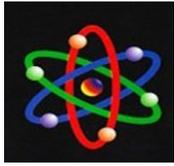
lebih ril lagi pada penelitian ini, maka peneliti membatasi kedalam sebuah indikator mengenai bagaimana peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lingga dalam memasarkan produk wisata yang ada di kawasan Pantai, peneliti membatasi masalah dengan indikator sebagai berikut :

a. Peluang Pasar Wisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lingga berperan dalam melakukan pengkajian dan pemantauan pasar wisata yang berpotensi untuk melakukan promosi produk wisata di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* dan informasi beberapa responden, dapat peneliti analisa mengenai peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam mengembangkan kawasan wisata Pantai yaitu mengenai peluang pemasaran produk wisata pantai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga menetapkan target pasar terlebih dahulu dengan mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan wisatawan, baik dari pelayanan, akomodasi, transportasi, dan infrastruktur pariwisata. Peluang pasar kabupaten Lingga menurut informasi dari responden sangat dilirik oleh pasar internasional karena letak geografis pulau Lingga yang berdekatan dengan Batam dan Tanjung Pinang sangat strategis untuk menanamkan investasi dari sektor pariwisata.

Menanggapi hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut, peneliti melakukan observasi berkenaan dengan pemasaran Produk wisata yang dibutuhkan wisatawan. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti mendapati bahwa sebagian besar wisatawan yang berkunjung dan menginap untuk mengikuti kegiatan *event* atau hanya sekedar melakukan perjalanan



wisata berasal kawasan Singapore dan Malaysia.

Berdasarkan kegiatan observasi dan hasil wawancara berkenaan dengan peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam Mengembangkan potensi wisata yang diantaranya yaitu peluang pemasaran produk wisata dapat dilihat bahwa peluang pemasaran produk wisata di Kawasan wisata pantai sangat besar karena letak geografis Pulau Lingga yang sangat strategis dan terletak di kawasan pasar internasional. Peluang itulah yang dimanfaatkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga untuk mengembangkan produk wisata, baik pantai, hotel, dan kuliner. Disisi lain peluang pasar di kawasan pantai berdampak pada keadaan ekonomi masyarakat yang ikut menjadi pelaku pariwisata melalui kegiatan ekowisatanya.

Promosi Wisata Pemerintah beserta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga berperan dalam melakukan promosi objek wisata pantai dengan menyelenggarakan kegiatan yang berskala nasional dan internasional. Maupun melakukan promosi melalui media *online*, media cetak dan media elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* dan informasi dari beberapa responden, dapat peneliti analisa mengenai peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam mengembangkan kawasan wisata pantai yaitu dalam mempromosikan produk wisata yang ada di kawasan wisata pantai adalah melalui kegiatan *event* bergengsi dan melalui media massa seperti media cetak, elektronik dan secara Visual melalui acara televisi.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mendapati bahwa terdapat baliho, Brosur dan serta pakain adat melayu dan contoh souvenir

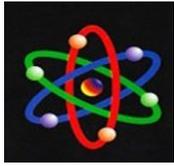
dan serta terdapat pula alat pembuat gasing yang digunakan untuk pertunjukan gasing dari beberapa Negara sebagai salah satu promosi kebudayaan masyarakat, yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sebagai cara untuk mempromosikan produk wisata.

Berdasarkan kegiatan observasi dan hasil wawancara berkenaan dengan peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam mempromosikan dan memasarkan produk wisata yang ada di kawasan pantai, peneliti mendapati bahwa dalam mempromosikan suatu produk wisata terlebih dahulu diadakan pengecekan kualitas suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil yang dicapai, dalam kegiatan promosi tersebut sangat didukung oleh letak geografis kabupaten Lingga yang berada di tengah pasar internasional sehingga sangat di dominasi oleh wisatawan mancanegara. Kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kegiatan kepariwisataan dan Melalui media massa dan didukung oleh pemerintah Provinsi dan pihak swasta yang juga merupakan pelaku pariwisata.

Meningkatkan Kepuasan Wisatawan

Kepuasan wisatawan merupakan hasil yang didapatkan oleh wisatawan terhadap suatu produk atau objek wisata yang ditawarkan dan diperoleh dari pelayanan, fasilitas penunjang maupun sarana pariwisata yang memadai. Untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam meningkatkan kepuasan wisatawan, maka peneliti meguraikannya dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Faktor Pelayanan (*Service*)



Pemerintah beserta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga berperan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan wisatawan, saat melakukan kegiatan wisata, seperti memberikan sambutan rombongan wisata, sopan santun, keramahan tamahan dari tuan rumah, serta menyediakan fasilitas wisata untuk wisata minat khusus.

b. Faktor Keamanan (*Safety*)

Pemerintah beserta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga berperan dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan yang berkunjung, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. sarana dan prasarana yang aman, serta keamanan dilindungi masyarakat, baik dari alam maupun tindakan kriminal. Hasil wawancara dengan *key informan* dan informasi dari beberapa responden, dapat peneliti analisa mengenai peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam mengembangkan kawasan objek wisata Pantai yaitu berkenaan dengan faktor keamanan bagi wisatawan dan masyarakat lokal itu sendiri. Dikbudpar Kabupaten Lingga bekerjasama dengan pihak kepolisian apabila diselenggarakan kegiatan kepariwisataan. Selain itu pihak pengelola usaha pariwisata juga mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan wisatawan sebagai konsumen.

Memberdayakan Masyarakat Lokal

Memberdayakan potensi sumber daya manusia sebagai pelaku pariwisata menjadikan pariwisata tidak hanya berdampak pada pembangunan, namun juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa melalui kunjungan wisatawannya yang dapat saling mengenalkan suatu kebudayaan dan disisi lain pariwisata juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu

daerah melalui kebijakan dan pengelolaan yang baik oleh pemerintah. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam mengembangkan kawasan wisata Pantai dengan memberdayakan masyarakat lokalnya maka peneliti menguraikannya dengan indikator-indikator sebagai berikut:

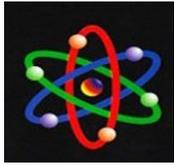
a. Peningkatan Kompetensi Masyarakat Lokal

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga berperan dalam memberdayakan masyarakat lokal untuk kegiatan kepariwisataan seperti melakukan berbagai pelatihan, pembinaan, dan memberdayakannya dalam kegiatan kelompok industri rumahan dalam bidang kepariwisataan.

PENUTUP

Dalam mengembangkan potensi wisata di kawasan wisata pantai, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga mencanangkan kawasan wisata pantai sebagai kawasan wisata terbuka untuk kalangan menengah kebawah, potensi yang dikembangkan yaitu pantai dan lautnya melalui kegiatan pemeliharaan objek wisata pantai, dan untuk potensi budaya dilaksanakan program Desa Wisata yang akan di garap di Kelurahan Daik, Desa Mepar dan Desa Resun, sedangkan fasilitas sarana dan prasarana bekerjasama dengan pihak swasta dan perangkat daerah lainnya seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Dalam mempromosikan dan memasarkan produk wisata yang ada di kawasan Pantai, peneliti menyimpulkan bahwa diadakan pengecekan kualitas suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil yang dicapai, dalam kegiatan promosi tersebut



sangat didukung oleh letak geografis kabupaten Lingga yang berada di tengah pasar internasional sehingga sangat didominasi oleh wisatawan mancanegara. Kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *event* dan melalui media massa dan didukung oleh pemerintah Provinsi dan pihak swasta yang juga merupakan pelaku pariwisata Hotel dan kuliner.

Sedangkan dalam meningkatkan kepuasan wisatawan dapat disimpulkan bahwa dilaksanakan program pemerliharaan kawasan pantai yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku pariwisata dengan menekankan pada kualitas sarana prasarana dan infrastruktur yang ada sesuai dengan kebutuhan wisatawan, dan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan mancanegara diselenggarakan kegiatan penyambutan. Sedangkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga bekerjasama dengan pihak kepolisian yang berpatroli dan masyarakat setempat. Hal tersebut juga terkendala oleh antusias masyarakat yang masih sedikit mengikuti program sosialisasi dan pembinaan.

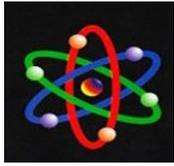
Pemberdayaan masyarakat lokal juga dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga yaitu dalam program Desa Wisata serta pembinaan dan pelatihan kepada kelompok industri rumahan dalam pembuatan Souvenir dan oleh-oleh, sehingga dengan memberdayakan masyarakat tersebut selain dapat meningkatkan kompetensi masyarakat dalam bidang pariwisata, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, serta dampak positif dari kegiatan tersebut adalah

meningkatnya citra pariwisata Kabupaten Lingga akan tetapi program Desa wisata belum sepenuhnya berjalan karena terhambat oleh respon masyarakat dan penentuan lahan garapan yang belum dipastikan untuk dilaksanakan program tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas, secara garis besar peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga telah berperan dalam mengembangkan kawasan wisata pantai. Peran tersebut adalah menjadikan kawasan Pantai sebagai area wisata terbuka untuk kalangan menengah kebawah melalui program sadar wisata untuk masyarakat serta menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku pariwisata dengan mengembangkan kawasan desa wisata, Serta memanfaatkan peluang pasar melalui letak geografis yang strategis diantara jalur internasional melalui promosi produk wisata dan penyelenggaraan *event* bertaraf internasional untuk mengangkat citra pariwisata Kabupaten Lingga dimata dunia serta secara berkelanjutan dapat menumbuh kembangkan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto.2006. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan.2001. *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Djopari dan Ratnia Solihah, 2008,01 *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta Universits Terbuka
- Iskandar.2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press



- Lalobo, Muhammad. 2005. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Grafindo Persada
- Lukiastuti Fitri. 2011. Manajemen Stratejik Dalam Organisasi. Jakarta : CAPS
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Iwan.2011. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Pitana I Gde. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Soerjono Soekanto.2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Surya Adisubrata, winarta 2003. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Semarang : CV. Aneka Ilmu.
- Syafiie, Inu Kencana. 2004. “Filsafat Pemerintahan” mencari bentuk goodgovernment yang sebenarnya. Jakarta: CV. Mandar maju.
- Wardiyana.2006. Metode Penelitian Pariwisata. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Widjaja.2007. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Yoeti Oka.2006. Pariwisata Budaya. Jakarta: PT. Pradnya Paramita